

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Sejarah panjang pasar modal Indonesia dimulai jauh sebelum negara ini merdeka, yaitu di era penjajahan. Bursa efek pertama kali didirikan pada era kolonial Belanda dengan tujuan mendukung aktivitas ekonomi kolonial. Seiring berjalannya waktu, pasar modal Indonesia mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perkembangan ekonomi dan politik bangsa. Berikut adalah rangkuman perjalanan sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) dari awal berdirinya hingga masa kini.

Pada Desember 1912, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Jakarta untuk mendukung kepentingan kolonial, terutama perusahaan VOC. Namun, aktivitas bursa terhenti sementara pada 1914-1918 akibat dampak Perang Dunia I. Bursa Efek di Batavia kembali beroperasi pada 1925-1942, diikuti dengan pendirian Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Sayangnya, aktivitas pasar modal kembali terhenti akibat Perang Dunia II.

Selama pendudukan Jepang dan awal masa kemerdekaan Indonesia, Bursa Efek ditutup dari tahun 1942 hingga 1952. Pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda menyebabkan aktivitas pasar modal semakin menurun, hingga akhirnya mengalami kevakuman selama lebih dari dua dekade dari tahun 1956 hingga 1977. Presiden Soeharto meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dikelola oleh BAPEPAM pada 10 Agustus 1977, ini sebagai tanda bangkitnya pasar modal kembali. PT Semen Cibinong menjadi perusahaan pertama yang

sahamnya dicatatkan dalam bursa. Namun, aktivitas perdagangan berjalan lambat, dengan hanya 24 perusahaan yang terdaftar hingga tahun 1987.

Untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan penawaran umum, pemerintah memperkenalkan Paket Kebijakan Desember 1987 (PAKDES 87). Deregulasi sektor perbankan dan pasar modal pada 1988 semakin mendorong partisipasi investor asing. Pada 1992, BAPEPAM berubah fungsi menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, sementara Bursa Efek Jakarta (BEJ) diswastakan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disahkan pada tahun yang sama dengan diterapkannya JATS, sistem perdagangan otomatis. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi terbentuk pada 2007 melalui penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Untuk meningkatkan kapasitas perdagangan BEI meluncurkan sistem perdagangan JATS-NextG pada tahun 2009. Tahun 2018 menjadi momen penting dengan peluncuran sistem e-IPO yang mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam penawaran saham perdana. Pada tahun 2021, lonjakan jumlah investor ritel, terutama dari kalangan milenial, terjadi berkat kemudahan investasi digital. Tahun 2022, jumlah perusahaan tercatat di BEI melampaui 800 emiten, mencerminkan pertumbuhan pasar modal yang signifikan. Pada tahun 2023, BEI terus berfokus pada inklusi keuangan melalui program edukasi pasar modal di berbagai wilayah Indonesia.

Sejarah Bursa Efek Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi dan politik bangsa yang terus berkembang. Dari masa kolonial hingga era digital, BEI telah mengalami berbagai transformasi yang menjadikannya salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang

mendukung, BEI diharapkan dapat terus berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

2.2 Profil Perusahaan

Objek dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan BUMN yang tergabung dalam indeks IDX BUMN20 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana menurut laman idx.co.id dari total 20 perusahaan yang terdaftar, terdapat 18 perusahaan BUMN dan 2 diantaranya merupakan BUMND. Berikut ini daftar sampel perusahaan beserta kode saham dan sektor usaha yang dijalankan.

Tabel 2.1 Daftar perusahaan BUMN dan Sektor Usahanya

No.	Kode Saham	Perusahaan	Sektor Usaha
1.	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Konstruksi
2.	AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Perbankan
3.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan
4.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan
5.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan
6.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perbankan
7.	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perbankan
8.	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan Syariah
9.	ELSA	PT Elnusa Tbk	Energi
10.	JSMR	PT Jasa Marga Tbk	Jasa Transportasi
11.	MTEL	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	Telekomunikasi
12.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Energi
13.	PGEO	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Energi
14.	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	Pertambangan
15.	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Konstruksi
16.	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Industri Semen
17.	TINS	PT Timah Tbk	Pertambangan
18.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Telekomunikasi

Sumber : idx.co.id, data diolah

2.2.1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Adhi Karya adalah emiten hasil nasionalisasi dari perusahaan Belanda pada tahun 1960 dan resmi menjadi BUMN pada 1974. Pada 2004, Adhi Karya mencatatkan saham perdananya di bursa, menjadikannya perusahaan konstruksi

pertama yang tercatat di pasar saham Indonesia. Dalam IPO tersebut, sebanyak 441.320.000 lembar saham umum tercatat atas nama kepemilikan terbaru ditawarkan dengan harga Rp150 per lembar dan nilai nominal Rp100 per lembar. Pada 2011, Adhi Karya melakukan transformasi besar dengan memperbarui visi, misi, dan nilai inti perusahaan, serta mendirikan ADHI Learning Center untuk pengembangan sumber daya manusia.

Ekspansi dimulai dengan pendirian anak perusahaan seperti Adhi Persada Properti pada 2012 dan Adhi Persada Gedung tahun 2014. Sejak itu, PT Adhi Karya terus berkembang dengan mendirikan lebih banyak anak perusahaan, termasuk Adhi Commuter Properti pada 2018 dan Dumai Tirta Persada pada 2019. Puncaknya, pada 2023 perusahaan meresmikan LRT Jakarta dan Jakarta Arena GBK serta membentuk PT Jakarta Metro Expressway, perusahaan terus menunjukkan perannya dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pemerintah RI sebagai pemegang utama saham PT Adhi Karya dengan prosentase 64.33 % dan masyarakat dengan prosentase sebesar 35.67 %.

2.2.2 PT Bank Raya Indonesia Tbk

Bank Raya mulai beroperasi pada 8 Februari 1990 setelah memperoleh izin usaha pada 11 Desember 1989. Perusahaan melakukan penawaran saham perdananya (IPO) pada 30 Juni 2003 dengan menawarkan sebanyak 529.336.690 lembar saham, dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar. Ditahun yang sama perusahaan berganti nama menjadi PT Bank Agroniaga Tbk. Saham mayoritas perusahaan kemudian diakuisisi oleh Bank BRI pada 2011, dan nama Bank Agroniaga pun diubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro).

Sebagai bagian dari inovasinya, BRI Agro meluncurkan produk pinjaman digital pertama bernama PINANG pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 Bank ini bertransformasi menjadi bank digital utama BRI untuk melayani segmen mikro, kecil, dan UMKM. Untuk meningkatkan komitmen perusahaan dalam transformasi menjadi bank digital modern, nama bank berubah menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk dalam RUPSLB. Sebagai anak perusahaan Bank BRI, pemegang saham utama Bank Raya Indonesia yaitu Bank BRI dengan prosentase sebesar 86.85 % dan masyarakat dengan prosentase sebesar 13.15 %.

2.2.3 PT Aneka Tambang Tbk

ANTAM adalah perusahaan BUMN yang berdiri di tahun 1968 dengan menyatukan sejumlah entitas perusahaan dan proyek tambang pemerintah. Perusahaan mulai mengoperasikan Pabrik Feronikel I di Pomalaa pada 1976, disusul tambang nikel di Pulau Gebe (1979) dan tambang emas Pongkor (1994). Sebagai bagian dari strategi ekspansi, ANTAM mencatatkan sahamnya di BEI pada 1997 serta di Australia pada 1999. Dalam IPO pada 27 November 1997, perusahaan menawarkan 430.769.000 lembar saham Seri B dengan Rp1.400 untuk harga per saham dan Rp500 untuk nilai nominal per saham. ANTAM terus berkembang dengan mengoperasikan Pabrik Feronikel III pada 2007 serta mengakuisisi Tambang Emas Cibaliung pada 2009.

Pada tahun 2017, ANTAM mencapai produksi feronikel tertinggi dan meraih PROPER Emas atas kinerja lingkungannya. Memasuki era baru, ANTAM mencatat penjualan emas tertinggi pada 2022 serta terakreditasi dengan standar ISO 37001:2016, yang merupakan sertifikasi untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 2020. Dengan inovasi berkelanjutan dan fokus pada hilirisasi

mineral, ANTAM terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemegang saham utama PT Aneka Tambang yaitu PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebesar 65 % dan masyarakat sebesar 35 %. Sama seperti PT Bukit Asam, Antam juga merupakan bagian dari holding BUMN pertambangan MIND ID, sehingga kepemilikan saham utamanya ada pada PT Mineral Industri Indonesia.

2.2.4 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank milik negara pertama di Indonesia yang awalnya berfungsi sebagai bank sentral sekaligus bank komersial. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Salah satu tugas awalnya yang penting adalah menerbitkan dan mengelola Uang Republik Indonesia (ORI), mata uang pertama Republik Indonesia. BNI menjadi bank devisa pada 1955 dan membuka cabang internasional pertama di Singapura, menandai langkah awal dalam memperkuat kehadirannya di pasar global. BNI merupakan bank BUMN awalnya yang melantai di bursa saham melalui IPO.

Bank Negara Indonesia (BNI) mengadakan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering* atau IPO) pada 25 November 1996 dengan menawarkan 1.085.032.000 lembar saham Seri B. Saham tersebut ditawarkan dengan harga Rp850 per lembar, setiap lembarnya bernilai Rp 500. Saat ini, mayoritas saham BNI dimiliki Pemerintah Republik Indonesia dengan porsi kepemilikan sebesar 60%, sementara 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat. BNI terus bertransformasi dengan berfokus pada layanan internasional dan digital guna memenuhi kebutuhan nasabah serta mewujudkan visinya sebagai pengelola keuangan terkemuka yang terbaik dalam kinerja berkelanjutan dan pelayanan.

2.2.5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) awalnya berdiri dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tahun 1895. Bank ini berfokus pada layanan simpan pinjam guna mendukung ekonomi rakyat dan kemudian menjadi bank pemerintah pertama setelah Indonesia merdeka. Seiring perkembangannya, BRI mengalami berbagai perubahan, termasuk penggabungan dengan bank lain menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) di tahun 1960 serta integrasinya ke dalam Bank Indonesia pada tahun 1965.

BRI mengadakan penawaran saham pertama (*Initial Public Offering* atau IPO) pada 10 November 2003 dengan penawaran 3.811.765.000 lembar saham biasa seri B. Dari jumlah tersebut, 1.764.705.000 lembar merupakan saham baru, sementara 2.047.060.000 lembar merupakan saham kepunyaan negara. Harga penawaran saham ditentukan sebesar Rp875 per lembar, setiap lembarnya bernilai Rp500. Sebagai perusahaan BUMN, BRI dimiliki mayoritas Pemerintah Republik Indonesia memiliki sebesar 53,19%, sedangkan 46,81% selebihnya milik masyarakat. Kini, BRI berfokus pada sektor UMKM dan terlibat penting guna memperluas jangkauan layanan keuangan nasional.

2.2.6 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

BTN memulai sejarahnya di tahun 1897 sebagai Postspaarbank, setelah diambil alih pemerintah Jepang pada tahun 1942 kemudian berganti nama menjadi Tyokin Kyoku. Bank ini kemudian dinamai Bank Tabungan Pos di tahun 1950 oleh pemerintah RI, dan namanya kembali diganti menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) pada 1963. BTN sebagai institusi yang ditunjuk untuk memberikan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka mendukung agenda pembangunan perumahan rakyat pada 1974.

Bank Tabungan Negara (BTN) melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) pada 17 Desember 2009, dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru serta 6.353.999.999 lembar saham milik negara. Saham tersebut dijual dengan harga Rp800 per lembar, sementara nilai nominalnya sebesar Rp500 per lembar. Saat ini, mayoritas saham BTN dimiliki Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 60%, sementara 40% sisa itulah milik masyarakat. Sebagai bagian dari upaya transformasi di era digital, BTN meluncurkan logo baru pada tahun 2024 sebagai simbol modernisasi dan inovasi.

2.2.7 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri berdiri pada Juli 1999 hasil peleburan empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Bumi Daya, serta Bank Ekspor Impor Indonesia. Seiring perkembangannya, Bank Mandiri mencatat peningkatan kinerja dengan pertumbuhan keuntungan menjadi Rp5,3 triliun pada tahun 2004, yang awalnya Rp1,18 triliun di tahun 2000. Pada 14 Juli 2003, Bank Mandiri melaksanakan penawaran saham perdana (IPO), dengan menerbitkan 4.000.000.000 lembar Saham Biasa Seri B. Saham tersebut ditawarkan dengan harga Rp675 per lembar, sementara nilai nominalnya sebesar Rp500 per lembar. Saat ini, mayoritas saham Bank Mandiri Pemerintah Republik Indonesia memegang kepemilikan sebesar 52% diikuti masyarakat dengan 40%, serta Indonesia Investment Authority sebesar 8%.

Pada periode 2010–2014, bank ini memperbarui visinya menjadi "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif." Bank Mandiri menargetkan sebagai perusahaan yang menduduki peringkat teratas terkait kapitalisasi pasar di Indonesia di tahun 2014 dan salah satu dari lima bank teratas di ASEAN. Selanjutnya, pada periode 2015–2020, transformasi lanjutan difokuskan pada visi masa depan yang ingin dicapai adalah "*The Best Bank in ASEAN by 2020*." Hingga kini, Bank Mandiri terus memperkuat dominasinya di sektor perbankan dan memastikan keberlanjutan transformasi guna mencapai tujuan strategis.

2.2.8 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bank ini terbentuk setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui merger tiga bank syariah pada 27 Januari 2021, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah. Sebelum merger, BSI merupakan Bank BRI Syariah yang telah beroperasi sejak 19 Desember 2007. Bank ini telah melantai di Bursa Efek Indonesia jauh sebelum penggabungan terjadi. Pada Mei 2018, BSI melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) dengan menerbitkan 2.623.350.600 lembar saham baru, dengan nilai nominal Rp500 per saham dan harga penawaran Rp510 per saham. Saat ini, mayoritas saham BSI dimiliki oleh tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri sebesar 51,47%, Bank Negara Indonesia (BNI) 23,24%, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 15,38%, sedangkan 9,91% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Merger ini menggabungkan keunggulan dari ketiga bank tersebut, sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan, serta memperkuat permodalan. Peluang bank ini untuk berkembang dan masuk dalam jajaran bank syariah terkemuka dunia sangat terbuka. Selain menunjukkan kinerja yang terus meningkat, BSI juga mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang berupaya membangun ekosistem industri halal serta menghadirkan bank syariah berskala nasional yang kuat dan besar. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan industri keuangan syariah, yang menjadi peluang strategis bagi BSI.

2.2.9 PT Elnusa Tbk

Elnusa awalnya merupakan pendukung operasional Pertamina dalam layanan perbaikan dan pemeliharaan kapal, dengan memberikan dukungan pada bidang radar digunakan pada kapal, sistem navigasi dan peralatan komunikasi elektronik. Perusahaan ini berdiri pada 25 Januari 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara, dan namanya resmi berubah menjadi PT Elnusa pada 1984. Kemudian pada tahun 2007, perusahaan mengonsolidasi empat anak perusahaannya yaitu PT Elnusa Workover Services, PT Elnusa Drilling Services, PT Elnusa Geosains dan PT Sinar Riau Drillindo, guna memperkuat fokusnya sebagai penyedia jasa hulu migas terpadu.

Elnusa melakukan penawaran saham perdananya (IPO) pada 6 Februari 2008 dengan jumlah sebanyak 1.460.000.000 lembar saham, dengan harga penawaran awal sebesar Rp400 (nilai penuh) per lembar. Dalam struktur kepemilikannya, mayoritas saham PT Elnusa Tbk dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi dengan persentase 51,10%, diikuti oleh kepemilikan masyarakat sebesar 42,40%, serta PT

Panin Sekuritas yang menguasai 6,5% saham perusahaan. Sepanjang perjalanannya, perusahaan mencatatkan pendapatan tertinggi dalam sejarahnya pada tahun 2018, yang didorong oleh strategi diversifikasi portofolio yang semakin kuat.

2.2.10 PT Jasa Marga Tbk

Jasa Marga didirikan pada 1 Maret 1978, dan pemerintah kemudian memperkenalkan sistem BOT (Build, Operate and Transfer) untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol. Sebagai operator jalan tol pertama di Indonesia, Jasa Marga mengelola Tol Jagorawi dan memperluas pengelolaannya ke tol Jakarta pada tahun-tahun berikutnya. Pada 1 November 2007, Jasa Marga resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana (IPO), dengan melepas 2.040.000.000 saham Seri B seharga Rp1.700 per saham dengan nilai nominal Rp500 per saham. Saat ini, mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 70%, sementara 30% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan industri, Jasa Marga mengadopsi sistem pembayaran elektronik di seluruh jalan tol pada 2017 serta menerbitkan berbagai instrumen pendanaan, seperti Komodo Bond dan Project Bond MLJ. Pada 2018, perusahaan berhasil mengoperasikan 1.000 km jalan tol, termasuk Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Hingga akhir 2022, Jasa Marga telah memiliki 16 anak perusahaan dan 5 entitas asosiasi, serta mengelola 36 konsesi jalan tol dengan total panjang 1.736 km, mencakup 48% dari total jalan tol komersial yang beroperasi di Indonesia.

2.2.11 PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Pada 18 Oktober 1995 Telkom mendirikan anak usahanya yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalimantan yaitu PT Dayamitra Malindo. Kemudian pada 28 Agustus 1997 namanya berganti menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi (mitratel). Mitratel mendapat kepercayaan dari induk perusahaannya, Telkom, untuk memperluas bisnis pengelolaan menara telekomunikasi ke skala nasional sejak 2007. Saat ini, Mitratel mengelola lebih dari 36.719 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh operator seluler di Indonesia telah menjadi penyewa dengan menempatkan perangkat BTS mereka di menara yang dikelola oleh Mitratel.

Pada 22 November 2021, Mitratel resmi melantai di bursa dengan melakukan penawaran saham perdana (IPO), menawarkan sebanyak 23.493.524.800 saham biasa dengan harga Rp800 per saham dan nilai nominal Rp228 per saham. Struktur kepemilikan saham Mitratel saat ini terdiri dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dengan 74,1%, masyarakat sebesar 14,5%, PT Maleo Investasi Indonesia sebesar 6%, serta Government of Singapore sebesar 5,4%.

2.2.12 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PGN merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak era kolonial Belanda dan secara resmi berstatus sebagai perusahaan negara pada 13 Mei 1965. Dalam upaya strategis, PGN mencatatkan sahamnya di bursa pada 15 Desember 2003 dengan melepas 1.296.296.000 lembar saham, terdiri dari 820.987.000 saham baru dan 475.309.000 saham hasil divestasi Pemerintah RI. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp500 per lembar dan ditawarkan dengan harga Rp1.500 per lembar. Saat

ini, struktur kepemilikan saham PGN didominasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 56,90%, sedangkan sisanya, 43,10%, dimiliki oleh masyarakat.

PGN terus memperluas lini usahanya dengan mendirikan sejumlah anak perusahaan, seperti PT PGN LNG Indonesia, PT Saka Energi Indonesia, PT PGAS Solution dan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara. Pada 11 April 2018, PGN resmi bergabung dalam Holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero) dan menjadi subholding gas. Dengan pengalaman lebih dari 150 tahun, PGN terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata melalui penyediaan infrastruktur energi yang andal, inovatif, dan berkelanjutan.

2.2.13 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Sebagai wujud komitmen dalam pemanfaatan energi panas bumi, Pertamina mendirikan anak perusahaan bernama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) pada tahun 2006. PGE berperan dalam mengelola, mengembangkan, serta memanfaatkan potensi energi panas bumi di Indonesia. Seiring perkembangannya, PGE telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai wilayah, seperti Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan, guna mendukung penyediaan energi listrik berbasis energi terbarukan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang PLTP mencapai 617 MW.

Sebagai bagian dari subholding PNRE, PGE berkomitmen mempercepat pengembangan energi panas bumi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada 24 Februari 2023, perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dengan menerbitkan 10.350.000.000 lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp500 dan ditawarkan dengan harga Rp875 per lembar. Struktur kepemilikan sahamnya terdiri dari PT Pertamina Power Indonesia (68,82%),

Masdar Indonesia Solar Holding RSC Limited (14,97%), masyarakat (10,24%), dan PT Pertamina Povede Indonesia (Pedeve) (5,97%).

2.2.14 PT Bukit Asam Tbk

Pada tahun 1981, pemerintah mendirikan PT Bukit Asam (Persero) untuk mengelola tambang secara modern dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Perubahan signifikan terjadi pada Desember 2002 ketika perusahaan melangsungkan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Dalam IPO tersebut, perusahaan menawarkan 346.500.000 saham, yang terdiri dari 31.500.000 saham baru serta 315.000.000 saham divestasi milik pemerintah. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp500 per lembar dengan harga penawaran Rp575 per lembar.

Pada tahun 2017, PT Bukit Asam bergabung ke dalam Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Selain itu perusahaan juga tergabung dalam MIND ID, sehingga 65.93 % sahamnya dipegang oleh PT Mineral Industri Indonesia dan 34.07 % lainnya dipegang oleh masyarakat. Sebagai bagian dari MIND ID, PT Bukit Asam Tbk memperkuat posisinya sebagai pemain utama industri tambang nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global melalui sinergi dan efisiensi operasional.

2.2.15 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

PT PP (Persero) didirikan pada tahun 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Perusahaan mulai dikenal luas setelah berhasil membangun perumahan bagi karyawan PT Semen Gresik Tbk. Perusahaan ini mengerjakan proyek besar seperti Hotel Indonesia dan Bali Beach Hotel, serta mengubah statusnya menjadi Perusahaan Negara pada 1961. Perusahaan berganti nama

menjadi PT PP (Persero) pada tahun 1971 dan fokus pada sektor konstruksi, serta memperluas usaha ke bidang properti.

Pada 9 Februari 2010, PT Pembangunan Perumahan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) dengan melepas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per lembar dengan harga penawaran Rp560 per lembar. Saat ini, kepemilikan saham mayoritas PT Pembangunan Perumahan dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51%, sementara 49% sisanya dimiliki oleh masyarakat. Seiring perkembangannya, perusahaan memperluas cakupan bisnisnya ke sektor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta investasi. PT PP juga berperan dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur besar, seperti New Tanjung Priok dan tujuh bandara di Indonesia.

2.2.16 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia Tbk, sebelumnya dikenal sebagai PT Semen Gresik, didirikan pada 25 Maret 1953 dan mulai beroperasi pada 7 Agustus 1957 dengan kapasitas produksi awal sebesar 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1991, perusahaan menjadi BUMN pertama yang tercatat di bursa. Saat melakukan penawaran umum perdana (IPO), perusahaan melepas 40.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan harga penawaran Rp7.000 per lembar. Saat ini, kepemilikan saham PT Semen Indonesia Tbk didominasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan porsi 51,2%, sementara 48,8% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Pada 1995, PT Semen Indonesia memperluas operasinya dengan mengakuisisi PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, yang meningkatkan

kapasitas produksi menjadi 8,5 juta ton per tahun. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mengakuisisi beberapa perusahaan, termasuk PT Thang Long Cement di Vietnam pada 2012, dan PT Holcim Indonesia Tbk (sekarang PT Solusi Bangun Indonesia Tbk) pada 2019. Pada 2013, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan terus mengembangkan kapasitas produksi, yang mencapai 16,8 juta ton per tahun. Pada 2020, perusahaan melakukan rebranding menjadi SIG (Semen Indonesia Group), dengan visi menjadi penyedia solusi bahan bangunan yang inovatif dan berkelanjutan. SIG terus berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan, adopsi teknologi digital, serta mengedepankan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya, menjadi pemimpin di industri bahan bangunan regional.

2.2.17 PT Timah Tbk

PT Timah Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya pertambangan timah. Perusahaan ini didirikan pada 2 Agustus 1976 dan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) pada 19 Oktober 1995 dengan menerbitkan 176.155.000 lembar saham. Pada 8 Agustus 2008, PT Timah Tbk melakukan pemecahan nominal saham, mengubah nilai nominalnya dari Rp500 per lembar menjadi Rp50 per lembar. Saat ini, mayoritas saham PT Timah Tbk dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dengan kepemilikan sebesar 65%, sementara 35% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Kegiatan utama yang dilakukan yaitu memproduksi timah melalui proses penambangan dan pengolahan, selain itu juga melakukan pemasaran dan perdagangan, bahkan logam timah yang diproduksi sudah masuk pasar

internasioanl. Beberapa anak perusahaan yang dimiliki PT Timah Tbk bergerak dibidang jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, penambangan timah, jasa rekayasa teknik, perbengkelan dan galangan kapal serta penambangan non timah. Domisili utama perusahaan berada di dua wilayah yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Pangkalpinang, sementara untuk wilayah operasinya berada di lima wilayah yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cilegon dan Kalimantan Selatan.

2.2.18 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor telekomunikasi digital, layanan informasi, serta komunikasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1965 di Jakarta dan melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada 14 November 1995. Saat IPO, Telkom menawarkan 933.333.000 saham baru Seri B serta 233.334.000 saham Seri B dengan harga penawaran Rp1.000 per saham dan nilai nominal Rp500 per saham. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan 700.000.000 saham Seri B dalam bentuk American Depositary Shares (ADS) di Bursa Efek New York (NYSE) dan Bursa Efek London (LSE). Saat ini, mayoritas saham Telkom dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52%, sedangkan 48% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Saat ini, Telkom memiliki 12 anak perusahaan yang berkontribusi positif bagi investor serta masyarakat di berbagai sektor. Seiring perkembangannya, Telkom telah bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi berbasis fixed line menjadi perusahaan berbasis digital. Strategi bisnis yang diterapkan berorientasi pada pelanggan dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Transformasi

ini bertujuan untuk menjadikan Telkom lebih agile dan lean, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang. Dengan komitmen tinggi terhadap inovasi dan pelayanan, Telkom terus berupaya memberikan pengalaman pelanggan yang optimal serta memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.